

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah atau biasa disebut Islamic Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. Bank Syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga (Ascarya & Yumanita, 2005).

Sama halnya dengan bank konvensional peranan bank syariah juga diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai perantara keuangan (*financial intermediate*) bank melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang surplus dana dalam berbagai bentuk simpanan. Melalui penghimpunan dana, bank membayar bunga (bank konvensional) atau nisbah bagi hasil (bank syariah) kepada masyarakat atau nasabah penyimpan. Selanjutnya bank menyalurkan dana tersebut (bagian terbesar) dalam bentuk kredit (bank konvensional) atau pembiayaan (bank syariah) kepada masyarakat yang defisit dana (Abdullah, 2003). Sehingga dengan adanya fungsi intermediasi yang dilakukan, bank akan berjalan optimal apabila pihak surplus dana dan defisit dana memiliki kepercayaan penuh kepada bank (Abdullah & Suliswanto, 2017).

Selain sebagai perantara keuangan (*financial intermediate*) Bank Syariah juga merupakan salah satu sistem keuangan nasional yang selama dua puluh tahun telah menunjukkan kinerja yang baik dibandingkan dengan bank konvensional. Pada era krisis (1997-1998) dan krisis global (2008) bank syariah mampu bertahan bahkan terus mengalami perkembangan yang baik hingga sekarang (Zuhroh, Ismail, & Maskie, 2015). Bahkan perkembangan bank syariah Indonesia cenderung lebih cepat daripada Malaysia. Apabila dilihat dari kinerja keuangannya, bank syariah telah memenuhi konsistensi kesehatan bank, baik itu dari lingkup industri, tingkat pertumbuhan aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan rata-rata bank syariah yaitu sebesar 50% per tahunnya.

Salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh bank, baik itu bank konvensional maupun bank syariah yaitu menyalurkan dana. Penyaluran dana disebut juga pembiayaan, istilah pembiayaan digunakan dalam perbankan syariah atau dalam perbankan konvensional biasa disebut dengan nama kredit.

Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan dalam perbankan syariah dibagi menjadi dua yaitu berdasarkan sifat penggunaannya dan berdasarkan keperluannya. Pembiayaan berdasarkan sifat penggunaannya dibagi menjadi dua hal : pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Sedangkan pembiayaan berdasar keperluannya yaitu pembiayaan modal kerja serta pembiayaan investasi. Dengan adanya pembiayaan tersebut akan sangat membantu para pelaku usaha, karena para pelaku usaha memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan bank (Antonio, 2001).

Bank dalam menyalurkan pembiayaan memerlukan ketersediaan dana cukup besar. Dana yang diperoleh bank salah satunya berasal dari dana pihak ketiga yaitu berupa giro, tabungan dan deposito yang dihimpun dari masyarakat kemudian disalurkan kepada masyarakat berupa pembiayaan. Dari tahun ke tahun perkembangan volume pembiayaan cenderung fluktuatif, pada tahun 2007 tercatat jumlah pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp 27,944 triliun, tahun 2008 tercatat 38,195 triliun, pada tahun 2009 pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah sebesar 46,886 triliun, begitu pula pada tahun 2010 tercatat pembiayaan yang disalurkan adalah sebesar 68,181 triliun, tahun 2011 sebesar 102,655 triliun, 2012 sebesar 147,505 triliun, 2013 tercatat sebesar 184,122 triliun. Pada tahun 2014 kondisi pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah cenderung turun yaitu tercatat sebesar 147,944 triliun, kondisi tersebut bisa dipengaruhi dengan adanya penurunan kinerja yang disebabkan oleh perlambatan ekonomi. Peristiwa penurunan kinerja tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Razak & Mohammed, 2008). Akan tetapi kondisi yang demikian tidak berlangsung lama, pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah kembali mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015 tercatat pembiayaan yang disalurkan sebesar 153,968 triliun dan tahun 2016 sebesar 177,482 triliun hal tersebut dikarenakan bank yang baru berkonversi dari bank umum yang berbasis konvensional menjadi bank umum berbasis syariah mampu menyesuaikan diri dengan basis baru yang digunakan serta semakin banyaknya masyarakat yang sadar dalam menggunakan jasa bank syariah (Rahmayanti, 2005). Sehingga pembiayaan bank syariah layak untuk diperhitungkan karena

sebagai salah satu sistem keuangan nasional, bank syariah berkontribusi nyata serta mampu mendorong perkembangan dan pembangunan ekonomi negara Indonesia (OJK, 2016). Kontribusi bank syariah dalam mendorong perkembangan dan pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran bank syariah dalam memperoleh keuntungan yang didapat dari pembiayaan, semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan oleh bank, maka semakin besar keuntungan yang diperoleh bank sehingga kontribusi bank syariah pun terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi juga besar. Kemampuan menyalurkan pembiayaan oleh bank syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ditinjau dari faktor eksternal maupun faktor internal bank.

Untuk melihat kondisi internal bank, pihak bank merujuk pada laporan keuangan yang diindikasikan dengan berbagai rasio keuangan. Beberapa rasio keuangan yang sering digunakan yaitu rasio permodalan yang diwakili oleh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), rasio likuiditas diwakili oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Selain itu kemampuan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, jumlah total aset bank juga sangat berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan.

Besar kecilnya pembiayaan yang disalurkan bank sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya dana pihak ketiga yang dihimpun. Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito. Selain itu dana pihak ketiga juga sebagai sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank, bank dalam menghimpun dana pihak ketiga bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola bank (Abdullah, 2003).

Selain dana pihak ketiga, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh bank. CAR sendiri sebagai salah satu hal penting yang harus diperhatikan atau dipenuhi oleh bank. CAR merupakan rasio untuk mengukur jumlah minimal modal yang dimiliki bank untuk menjamin aktiva yang mengandung resiko. Angka CAR yang dimiliki bank minimal 8%, apabila nilai CAR suatu bank kurang dari 8% maka bisa dikatakan bank tersebut kurang sehat dari segi permodalannya (Abdullah, 2003).

Faktor lain yang diduga mempengaruhi pembiayaan suatu bank yaitu tingkat likuiditas suatu bank atau biasa dikenal dengan *Financing to Deposit Ratio*. Karena dilihat dari portofolio pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah, FDR Bank Umum Syariah mampu mencapai angka 80%-90% dengan tambahan modal inti yang dimiliki. Kondisi tersebut jauh meninggalkan portofolio kredit bank konvensional atau *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang hanya mencapai sekitar 60%-70% (Khatimah, 2009).

Selain dana pihak ketiga, *Capital Adequacy Ratio* dan *Financing to Deposit Ratio* terdapat faktor lain yang juga berasal dari internal bank yaitu aset yang dimiliki oleh bank. Aset merupakan manfaat ekonomi yang dimiliki oleh suatu bank yang meliputi barang dan hak-hak yang memberikan manfaat di masa yang akan datang. Semakin tinggi nilai aset yang dimiliki oleh suatu bank maka bank akan semakin mampu memperbaiki struktur modal yang cukup untuk menjamin risiko dari penempatan aset-aset produktif salah satunya adalah

pemberian pembiayaan dengan tujuan bank akan memperoleh keuntungan (Kurniawati, 2014).

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan judul penelitian **“Analisis Tingkat Pembiayaan Bank Umum Syariah Tahun 2007-2016”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memberi kemudahan bagi penulis membatasi permasalahan yang diteliti, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh faktor-faktor, terutama faktor internal bank terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia mulai tahun 2007-2016.

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), total aset dan pembiayaan Bank Umum Syariah tahun 2007-2016?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan total aset berpengaruh terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah tahun 2007-2016?

C. Batasan Masalah

Pembiayaan dalam perbankan syariah terbagi dalam beberapa bagian, diantaranya yaitu pembiayaan berdasarkan skemanya maupun berdasarkan sektor yang dibiayai. Akan tetapi, agar pembahasan masalah tidak melebar dari rumusan masalah. Maka penelitian hanya berfokus pada seluruh pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah tanpa memerinci skema maupun sektor yang dibiayai.

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas, sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mendeskripsikan perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), total aset dan pembiayaan Bank Umum Syariah tahun 2007-2016.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan total aset terhadap tingkat pembiayaan Bank Umum Syariah tahun 2007-2016.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pengambil Kebijakan

a. Industri Perbankan

Sebagai fungsi intermediasi dana masyarakat, dan memberikan sumbangan informasi yang positif bagi perkembangan perbankan di Indonesia terutama perbankan syariah.

b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sebagai pengatur dan pengawas diharapkan OJK mampu untuk mendorong pembiayaan bank syariah dengan tidak melepaskan faktor kehati-hatian melalui ketentuan instrumen yang telah ditetapkan oleh OJK tersebut.

2. Bagi Peneliti Lebih Lanjut

Memberikan informasi terkait dengan pengembangan literatur pembiayaan berprinsip syariah.